

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Pajak dan Retribusi Daerah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 111 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Kepala Badan, mempunyai tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- b. pengoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2024 BPRD mempunyai target :

1. Penerimaan Pajak Daerah sebesar (100%) atau Rp. 105.205.000.000, dan
2. Persetase peningkatan penerimaan pajak sebesar (8,5 %)

Evaluasi kinerja :

- a. Pada Tribulan I tahun 2024, BPRD dengan target penerimaan pajak sebesar 105.205.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 26.518.419.149 **(25,21 %)**.
- b. Sedangkan peningkatan penerimaan pajak daerah sbb :

Realisasi peningkatan penerimaan pajak daerah di Tribulan I Tahun 2024 sebesar 16,82 % dari target 8,5 %

Tribulan I – 2024 : Rp. 26.518.419.149 **(25,21%)**.

Tribulan I – 2023 : Rp. 26.903.674.890 **(22,33%)**.

Selisih : Rp. 385.255.741

Perhitungan : $385.255.741 : 26.518.419.149 \times 100 = 1,45 \%$

$1,45 \%$: $8,5 \%$ x $100 = 17,06 \%$

(Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran bulan Desember 2023 dan 2024)

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan target dari Rp. 105.000.000.000 menjadi Rp. 105.205.000.000 sehingga mempengaruhi persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.

- c. Untuk capaian target IKU Bupati di Tri Bulan I tahun 2024 **sebesar 36,75% dapat tercapai 9,066 % (24,66 %)**

Perhitungan capaian IKU Kepala Daerah sebagai berikut :

Realisasi Pajak Daerah s/d Tr-I 2024 : Rp. 26.518.419.149

Realisasi Retribusi Daerah s/d Tr-I 2024 : Rp. 3.245.015.476

Jumlah : Rp. 29.763.434.625

Dibanding target PAD Tahun 2023 :

Rp. 29.763.434.625 : Rp. 328.286.718.273 x 100 = 9,066 %

: 9,066 : 36,75 x 100 = 24,66 %

- d. Sedangkan penyerapan anggaran sampai dengan Tribulan I - TA 2024 dari target Rp. 14.253.443.859 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.388.888.040 **(16,76 %).**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah terhadap PAD	36,75 %
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penerimaan Pajak daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	8,5 %
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	8,5 %
2	Meningkatnya pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 6.237.761.328	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.015.682.531	
JUMLAH		Rp 14.253.443.859	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi s/d Tribulan IV tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah terhadap PAD	36,75 %	24,66%
2	Meningkatnya penerimaan Pajak daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	8,5 %	25,21%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	8,5 %	17,06
3	Meningkatnya pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %	16,76

Penjelasan Capaian Kinerja :

1. Persentase capaian IKU Bupati.

Capaian target IKU Bupati tahun 2024 dari target **36,75 % sampai dengan Tribulan I – 2024 dapat tercapai 9,066%** (24,66%).

Realisasi Pajak Daerah : Rp. 26.518.419.149

Realisasi Retribusi Daerah: Rp. 3.245.015.476

Jumlah : Rp. 29.763.434.625

Target PAD : Rp. 328.286.718.273

Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut :

Realisasi Pajak + Realisasi Retribusi Daerah terhadap PAD.

Realisasi Pajak Daerah s/d Tr-I 2024 : Rp. 26.518.419.149

Realisasi Retribusi Daerah s/d Tr-I 2024 : Rp. 3.245.015.476

Jumlah : Rp. 29.763.434.625

Dibanding target PAD Tahun 2023 :

Rp. 29.763.434.625 : Rp. 328.286.718.273 x 100 = 9,066 %

9,066 : 36,75 x 100 = 24,66 %

Sehingga Capaian target IKU Kepala Daerah dari target tahun 2024 sebesar **36,75 %** s/d Tribulan I tahun 2024 tercapai **9,066 : 36,75 x 100 = 24,66 %**

2. Persentase capaian penerimaan Pajak Daerah

Capaian penerimaan pajak daerah s/d Tribulan I Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.105.205.000,000 dapat terealisasi sebesar Rp. 26.518.419.149 (25,21)

3. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi peningkatan penerimaan pajak daerah di Tribulan I -Tahun 2024 sebesar 17,05 % dari target 8,5 %

Tribulan I – 2024 : Rp. 26.518.419.149 (25,21)

Tribulan I – 2023 : Rp. 26.903.274.890 (22,33)

Selisih : Rp. 385.255.741

perhitungan : $385.255.741 : 26.518.419.149 \times 100 = 1,45 \%$

1,45 % : 8,5 % x 100 = 17,06 %

Angka ini menunjukkan adanya kenaikan penerimaan sebesar 17,06% Sedangkan penyerapan anggaran sampai dengan Tribulan I - TA 2024 dari target Rp. 14.253.443.859 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.388.888.040 **(16,76)**.

4. Perbandingan target/capaian tahun 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi s/d Tribulan I 2023	Target 2024	Realisasi s/d Tribulan I -2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah terhadap PAD	31,75 %	8,81% (27,75 %)	36,75 %	9,066 % (24,66%)
2	Meningkatnya penerimaan Pajak daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100 %	22,33	8,5 %	25,21 %
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	10 %	14,57 %	8,5 %	17,06 %
3	Meningkatnya pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %	23,83 %	100 %	16,76 %
Hambatan/ Permasalahan : 1. Belum optimalnya intensifikasi pemungutan Pajak Minerba akibat dasar pengenaan pajak minerba belum mengacu pada Pergub 2. Masih besarnya nilai tunggakan pajak daerah khususnya pajak Minerba dan Pajak PBB-P2 3. Akurasi Data base obyek dan Subyek Pajak Daerah belum maksimal. 4. Tingkat kepatuhan WP masih belum Optimal karena Pembayaran Pajak Hotel, Restoran dan Parkir pembayarannya masih bersifat taksasi. 5. Sanksi atas pelanggaran perda/perbup belum dilaksanakan secara tegas. 6. Belum terintegrasinya sistem informasi Retribusi Daerah 7. Masih ditemukan pemakaian setoran PBB-P2 oleh oknum petugas desa dan janji politik Kades yang terpilih berdampak pada penerimaan PBB-P2			Analisa dan upaya mengatasi permasalahan : 1. Operasi gabungan penertiban dan pemeriksaan SKAB pajak Minerba dan penyesuaian dasar pengenaan pajak minerba secara bertahap 2. Validasi piutang pajak daerah, penghapusan piutang pajak daerah yang kadaluwarsa dan penagihan aktif piutang pajak daerah dengan koordinasi dan melibatkan APH Kejaksaan Negeri. 3. Pendataan dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah yang berkelanjutan. 4. Memberikan sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan kepada Wajib Pajak serta			

	<p>8. Keterbatasan kartu elektronik yang belum mencukupi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak MBLB dengan kebutuhan jumlah penambang yang ada.</p>	<p>memberikan kelonggaran pembayaran pajaknya dengan cara taksasi kepada Wajib Pajak Baru.</p> <p>5. Koordinasi dan bersinergi dengan OPD terkait dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak daerah.</p> <p>6. Dilakukan Rekonsiliasi secara berkala dengan PD penghasil retribusi.</p> <p>7. Berkoordinasi dengan Instansi terkait (Inspektorat) untuk membantu penyelesaian bagi oknum petugas desa dan kepala desa yang terlibat pemakaian setoran PBB-P@ dan calon Kades dalam pemilihan desa tidak akan melakukan janji politik.</p> <p>8. Memberlakukan dua acara, yaitu penggunaan kartu e_MBLB dan E-SKAB.</p>
--	--	---

➤ Tabel Cost per outcome

No	Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			P	R	C (%)	T	R	C (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9/6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	6.237.761.328	8.293.527.889	93,76				
		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.562.500	104.000	0,44	32	1	3,125	7,10
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.203.500	-	0	3 Dokumen (Renstra, Renja & P-Renja)	1 Dokumen (P-Renja 2023 & Renja 2024)	33,33	0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.459.000	104.000	1,23	1 Dokumen RKA	1 Dokumen RKA	25	25
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.761.000	-	0	1 Dokumen (P-RKA,)	0 Dokumen (P-RKA)	0	0

No	Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			P	R	C (%)	T	R	C (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9/6
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.987.000	-	0	5 Laporan (LKJ, LAKIP. IKI/IKU)	1 Laporan (LKJ, LAKIP. IKI/IKU)	20	0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.152.000	-	0	22 Laporan	5 Laporan	22,73	0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.687.722.278	1.412.420.749	24,83	69	40	57,97	2,33
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.594.756.278	1.399.866.749	25,02	29/12 ASN	29/12 ASN	100	3,99
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85.728.000	12.554.000	14,64	12 Dokumen	3 Dokumen	25	1,71
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	628.000	-	0	12 Dokumen	3 Dokumen	25	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.098.000	-	0	1 Laporan	1 Laporan	25	0
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	3.842.000	-	0	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	670.000	-	0	12 Laporan	3 Laporan	25	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	876.372.437	111.362.380	12,71	34	12	35,29	2,77
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.452.868	-	0	1 Paket	1 Paket	0	0
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	394.547.449	88.972.000	22,55	5 Paket	3 Paket	60	0,026
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	151.484.120	546.700	0,36	2 Paket	1 Paket	50	1,388
		Penyediaan Bahan/Material	3.982.000	-	34,94	2 Paket	0 Paket	0	0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	306.500	1,02	12 Laporan	3 Laporan	25	0,032

No	Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			P	R	C (%)	T	R	C (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9/6
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.906.000	21.537.180	7,59	12 Laporan	3 Laporan	25	0,032
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	874.906.000	139.006.161	15,88	36	9	25	1,57
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.230.000	1.110.572	9,08	12 Laporan	3 Laporan	25	0,027
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.200.000	47.854.033	16,49	12 Laporan	3 Laporan	25	0,015
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.476.000	90.041.556	15,73	12 Laporan	3 Laporan	25	0,25
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260.427.756	-	0	0	0	0	0
		Pengadaan Barang Dan Peralatan Mesin Lainnya	260.427.756	-	0	24 Unit	0 Unit	0	0
		Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.691.560	16.494.000	5,63	207	26	12,56	2,23
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.877.960	11.909.000	6,11	64 Unit	3 Unit	0,04	0,006
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.290.000	4.585.000	6,34	142 Unit	23 Unit	0,16	0,025
		Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.523.600	-	0	1 Unit	0 Unit	0	0
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	8.015.682.531	870.536.064	10,86	39.257	9.813	25	2,30

No	Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			P	R	C (%)	T	R	C (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9/6
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	35.850.000	6.240.000	17,41	4 Dokumen	0 Dokumen	0	0
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	70.528.000	29.205.000	41,41	14 Dokumen	6 Dokumen	42,86	1,04
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	171.943.000	31.982.000	18,60	9 Laporan	1 Laporan	11,11	0,59
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	365.096.500	61.337.000	16,80	19 Laporan	3 Laporan	15,79	0,94
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	61.371.000	13.442.000	21,90	18 Laporan	4 Laporan	22,22	1.01
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	201.570.000	46.514.000	23,08	10.105 Obyek Pajak	2.119 Obyek Pajak	20,97	0,91
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.445.522.000	223.563.000	15,47	27.000 Layanan	7.361 Layanan	27,26	1,76
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	171.268.000	10.229.000	5,97	36 Dokumen	9 Dokumen	25	4,19
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	88.197.750	17.309.250	19,63	12 Laporan	3 Laporan	25	1,27
		Penagihan Pajak Daerah	1.655.257.018	166.589.968	10,06	12 Dokumen	3 Dokumen	25	2,49
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35.400.000	8.451.000	23,87	2.000 Pengajuan	300 Pengajuan	15	0,63

No	Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			P	R	C (%)	T	R	C (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9/6
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.508.920.200	279.478.846	18,52	12 Dokumen	3 Dokumen	25	1.35
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	69.066.000	5.400.000	7,82	4 Laporan	1 Laporan	25	3,20
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	347.164.860	-	0	6 Unit	0 Unit	0	0
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10.607.000	-	0	6 Laporan	0 Laporan	0	0
		Dokumentasi Pajak Daerah	0	0	0	11.472 Dokumen	10.552 Dokumen	91,9	0

Penjelasan Capaian Program / Anggaran :

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tribulan I tahun 2024, dari pagu anggaran Rp. 14.253.443.859 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.388.888.040 (16,76 %).

2.3. Evaluasi dan Analisis Target Kinerja

Target Kinerja dari penerimaan pajak daerah pada Tri bulan I tahun 2024 dari target 105.205.000.000 menjadi Rp. 78.686.580.851 terealisasi sebesar Rp. 26.518.419.149 (25,21%).

Persentase peningkatan penerimaan pajak dari target 8,5 % dapat tercapai **17,06 %**, angka ini menunjukkan peningkatan penerimaan pajak Tribulan I-2024 terhadap penerimaan Pajak pada tribulan I tahun 2023.

Capaian target IKU Kepala Daerah dari target tahun 2023 sebesar **36,75 %** s/d Tribulan I tahun 2024 tercapai **9,066 % (24,66 %)**.

Peningkatan capaian ini dikarenakan Pajak hotel, PBJT tenaga listrik, PBB-P2 dan BPHTB yang berkontribusi sangat baik terhadap penerimaan PAD.

2.4. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kinerja, Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera menindaklanjuti dengan mengusulkan Raperbup dan penyusunan SOP-SOP yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga sudah menyiapkan Aplikasi pelayanan Pajak Daerah yang sudah disesuaikan dengan Undang-undang HKPD yang sudah disesuaikan menu aturan maupun tarif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. yang itu semua dapat mendukung program Smart City.

Dari penggunaan Aplikasi tersebut masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Misal dengan diterapkannya E-BPHTB, masih adanya keberatan Wajib Pajak terhadap harga referensi (NJOP) yang ada dalam sistem. Namun sejauh ini dilakukan peningkatan terhadap Aplikasi dan tetap diberikan pengertian dan sosialisasi secara terus menerus tentang

pelayanan dengan Aplikasi agar masyarakat lebih paham dan sadar pajak. Untuk pelaksanaan pengendalian Pajak MBLB sudah dilaksanakan e-Pasir atau E-MBLB pada Stokpile di Lempeni agar pelaksanaan pemungutan Pajak Pasir semakin terkendali. Selain dari sosialisasi juga dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kesinambungan pelayanan pajak daerah.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang ini merupakan pelaporan atas Kinerja selama Tribulan I tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang berfungsi sebagai evaluasi atas pelaksanaan Kinerja dan anggaran program/kegiatan di Tribulan I tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, evaluasi atas kinerja di tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran atas keberhasilan maupun kekurangan yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan di tahun yang akan datang.

Bertolak dari evaluasi tahun lalu, maka diharapkan perbaikan capaian kinerja utamanya Program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target di tahun 2024

Dengan adanya hasil pelaporan LKJIP Tribulan I tahun 2024 ini, maka penetapan prioritas Program / Kegiatan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergi, akurat dan berkelanjutan.

Demikian LKJIP Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini dibuat untuk pedoman penyusunan Program / Kegiatan di tahun 2024.

Lumajang, 6 April 2024

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lumajang



ENDHI SETYO ARIFianto, S.Sos, M.Si
NIP. 19750313 200212 1 005